



DPRD DIY Dorong Pencarian Bansos Pasca-Perpanjangan PPKM

YOGYA, TRIBUN - Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, meminta Pemerintah DIY untuk segera menggulirkan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak kebijakan PPKM Level 4. Paket-paket bantuan dan relaksasi sangat dibutuhkan masyarakat di tengah situasi suli ini.

"Perpanjangan PPKM mesti diikuti turunnya bantuan untuk warga terdampak. Baik terdampak langsung dalam artian positif Covid-19 maupun tidak langsung," ungkap Huda, Rabu (28/7).

Menurutnya, hampir semua warga merasakan kondisi sulit saat ini, terutama warga kurang mampu dan pekerja informal yang sangat bergantung pada penghasilan harian. Misalnya seperti pelaku UMKM, PKL, tukang becak, dan kusir andong.

Perpanjangan PPKM mesti diikuti turunnya bantuan untuk warga terdampak.

"Juga warga isoman yang jumlahnya semakin banyak, mesti mereka semua dibantu pemerintah. Dengan turunnya bantuan akan mensukseskan PPKM, karena mereka lebih mudah tinggal di rumah," terangnya.

Karenanya, Huda juga mendorong agar Pemda DIY dapat segera menyelesaikan tahap refocusing atau perubahan alokasi pada

Dana Keistimewaan (Danais). Sebab saat ini sudah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 94/PMK.07/2021 yang menyatakan bahwa Danais bisa untuk penanganan Covid 19.

Agar dapat segera direalisasi, Pemda DIY bisa saja menyalurkan Rp250 juta kepada kalurahan-kalurahan di DIY untuk berbagai keperluan termasuk bantuan sosial.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadamanta Baskara Aji, sebelumnya memastikan bahwa Pemda DIY akan menyalurkan bansos kepada warga yang terdampak kebijakan PPKM. Pemda akan menyalurkan bansos dengan memanfaatkan APBD 2021. Sasarannya adalah warga terdampak yang sama sekali belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005